

# **PENGARUH BELANDA TERHADAP STRUKTUR PEMERINTAHAN DAN KEHIDUPAN POLITIK KERAJAAN PURBA 1906 - 1945**

**Andres M Ginting**

(Program Studi Pendidikan sejarah FKIP Universitas Simalungun)

Email: [Andresginting@gmail.com](mailto:Andresginting@gmail.com)

## **Abstrak**

Masuknya Belanda secara bertahap ke Simalungun membawa perubahan. Perubahan ini berdampak dibatasinya peran *harajaon* yang berkuasa. Melalui Besluit Gubernement Nomor 22, administrasi pemerintahan dibagi ke dalam 16 distrik dan huta berdasarkan kekuasaan raja yang berkuasa. Belanda menganeksasi wilayah tersebut, membuka perkebunan besar. Saat pembukaan tidak ada perlawanan karena tanah tidak dimiliki oleh rakyat, tapi dikuasai partuanon yang tunduk kepada raja. tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh Belanda terhadap struktur pemerintahan politik kerajaan purba. Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Dari hasil penelitian, Belanda sangat berpengaruh, bahkan mampu mengganti pemimpin yang dipilih pihak adat.

**Kata Kunci : Belanda, kerajaan purba, simalungun**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Struktur birokrat yang muncul di istana merupakan bentuk dari pendelegasian kekuasaan sang raja kepada pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelola pemerintahan dan sering terjadi karena sikap tradisi atau selera pribadi. Hal ini sangat berbeda dengan kekhasan para raja yang dimiliki oleh pemerintahan di Eropa. Konturuksi pemerintahan di kawasan lingkaran toba juga demikian,

brikorasi yang lekat dengan aroma adat-istiadat terpaksa mengalami perubahan secara radikal. Hal ini lazim terjadi dikawasan nusantara, hampir seluruh wilayah nusantara, kerajaan yang dibangun dengan tradisi budaya bermetaformosis menjadi sistem formalitas administrasi modern abad 20. Tanpa terkecuali belaku juga di simalungun, dengan masuknya penjajahan belanda, banyak mengubah sistem yang lazim berlaku di kerajaan-kerajaan simalungun. Pemerintah

yang awalnya berdiri diatas keputusan musyawarah menjadi bentuk sentralisasi pemerintahan. Struktur kekuasaan dibangun atas kebijakan dari pusat. Pusat diartikan sebagai penguasa dan komponen lainnya wajib tunduk. Musyawarah sebagai Roh dari kebudayaan ratusan tahun dikerajaan tersebut diubah menjadi sistem birokrasi yang bertumpu kepada individu.

Dengan Besluit Gubernement Nomor 22 (Staatsblad Nomor 531) pemerintah secara simultan dan terkadang agresif mengkonversi tradisi kerajaan menjadi bagian formalitas dengan mengadopsi sistem gaya eropa. Penulis dalam hal ini berkeinginan untuk menganalisis tentang Pengaruh Masuknya Belanda Terhadap Struktur Pemerintahan Dan Kehidupan Politik Kerajaan Purba.

### **Tinjauan Pustaka**

#### ***Sekilas Sejarah Simalungun***

Pada fase I Dari Kerajaan Nagur, Batak Timur Raya Menjadi Simalungun. Nama Simalungun pada zaman pra-sejarah Simalungun bermula dari Kerajaan Nagur yaitu dari tahun 500-1367, Pada zaman Kerajaan Batak Timur Raya, sejak

tahun 1367-1833 dan penggunaan nama Simalungun sejak tahun 1833, Yaitu karena sebutan nama kumpulan Batak Timur Raya tidak sesuai lagi karena bekas Kerajaan karo, sudah tidak termasuk lagi dalam Raja Na Opat. Masa itu terjadi fase ke II yang terdiri dari : (1). Kerajaan Dolok Silou (2). Kerajaan Tanah Jawa (3). Kerajaan Siantar (4). Dan Kerajaan Panei.

Pada periode 500-1295 diketahui terdapat bentuk sistem pemerintahan bersama yang terdiri dari 4 kerajaan yaitu Kerajaan Nagur, Silou, Batangiou dan Harau. Sistem pemerintahan bersama ini dikenal dengan nama sistem Raja Maropat atau Raja Nan Empat. Sedangkan pemerintahannya dikenal dengan nama Purba Deisa Nauluh atau Batak Timur Raya.

Berdirinya kerajaan-kerajaan baru yaitu kerajaan Dolok Silau oleh marga Purba Tambak, Tanah Jawa oleh marga Sinaga, Siantar oleh marga Damanik dan Panei oleh marga Purba Dasuha tetap menghidupkan sistem pemerintahan Raja Maropat sampai pada tahun 1865 walaupun pemerintahannya

sendiri sudah berganti. Pada tahun 1865 kembali kerajaan-kerajaan tersebut pecah menjadi 7 kerajaan yaitu Kerajaan Dolok Silau, Tanah Jawa, Siantar, Panei, Raya, Purba dan Silimakuta dan tidak lagi menggunakan sistem pemerintahan bersama.

### ***Kerajaan Purba***

Seperti didalam tradisi penulisan sejarah di Indonesia yang bertumpu pada tradisi lisan yang penuh romantika mitos dan kisah-kisah. Kisah berdirinya juga tidak terlepas dari hikayat dan legenda yang dituturkan secara turun temurun. Belum ada bukti tertulis yang cukup komprehensif untuk menjelaskannya.

Raja pertama Purba berasal dari tanah Pak-pak. Dia adalah seseorang dari marga Purba, yang hidup dari marga Purba, yang hidup dari berburu. Dia tiba di Nago Raya (Nagur Raya) sebuah kampung yang pada masa lalu termasuk Nagur dan kini dibawah Raya. Dan dijuluki *pangultop-ultop*, yakni pemburu dengan sumpit dibuat dari jenis bambu yang menghasilkan alat ini. Tuan Nagur Raya menerimanya

dengan baik dan memberikannya berburu burung. Karena parultop-ultop bertindak baik, Tuan Nagur Raya secara tiba-tiba memberikan putrinya untuk dinikahi.

Setelah beberapa hari tinggal disana, dia kembali ke Nagur Raya, tetapi muncul di kampung Simalobang. Disini dia beberapa saat tinggal pada seorang petani dan putrinya yang menanam berbagai tanaman.

Dia juga pandai bercocok tanam. Ketika mereka saling bertemu sama-sama pergi keladang. Parultop-ultop menikahinya. Akhirnya Tuan Simalobang mendengar bahwa adik mertuanya menikah dengan Parultop-ultop. Tentang hal ini dia sangat marah akan kembali. Parultop-ultop tidak mau datang kesini lagi. Ini alasan Tuan Simalobang mengusirnya dari tempat tinggalnya, tetapi parultop-ultop menjawab bahwa dia tidak bisa diburu-buru pergi dari sana karena lahan ini adalah miliknya.

Tuan Simalobang berkata tentang ini, "*Apabila anda berani bersumpah saya juga mengalah dan engkau bisa tampil sebagai raja*".

Parultop-ultop meminta waktu sebulan untuk mengambil tanah dan air. Parultop-ultop melakukannya setelah dia membuat Bumi ini dibawah Bulan dan Air dalam labu dan setelah itu duduk, bersumpah bahwa tanah dan air tempat dia duduk menjadi miliknya. Sejak itu tempat tinggalnya disebut Purba karena parultop-ultop adalah Raja marga Purba.

Pada zaman Raja purba ke II (Tuan Rajiman ) upaya meluaskan wilayah terus diperhebat atas bantuan dari panglimanya dari Samosir yaitu si Bette Nang-nag dan Parhole Nasa Anduri marga Simarmata. Maka kampung-kampung disekitar pantai Danau Toba sudah dikuasai, demikian pula Sipinggan, Huta Raja dan kampung-kampung lainnya diwilayah kerajaan Dolog Silau maupu Panei.

Pada waktu datangnya serangan balasan dari Kesultanan aceh yang menyerang Kerajaan Batak Timur Raya tahun 1613 yang menjadi panglima kerajaan Purba adalah *Parultop-ultop*.

Sewaktu kembali dari peperangan Parultop-ultop banyak

membawa barang-barang perhiasan dan uang yang ditinggalkan pasukan Aceh, sehingga Raja purba terkenal sebagai salah satu Raja yang terkaya di Simalungun. Adapun nama-nama Raja Purba yang pernah memerintah di Kerajaan Purba:

1. Tuan Raendan (Parultop-ultop) 1515 – 1560
2. Tuan Rajiman 1560 -1590
3. Tuan Nanggar 1590 – 1631
4. Tuan Batiran 1631 - 1650
5. Tuan Bakkara 1650 - 1679
6. Tuan Beringin 1679 - 1727
7. Tuan Bona Batu 1727 - 1762
8. Tuan Rajaulan 1762 - 1795
9. Tuan Atian 1795 - 1830
10. Tuan Horma Bulan 1830 - 1867
11. Tuan Raondap 1867 - 1904
12. Tuan Rahalim 1904 - 1921
13. Tuan Karel Tanjung (Parjabayak) 1921 - 1934
14. Tuan Mogang 1934 – 1947 (tewas dalam revolusi sosial)

(Batara sangti,1977: 176-177).

### ***Struktur Pemerintahan Simalungun***

Meskipun di Simalungun berpola Kerajaan, tidak persis sama dengan model pemerintahan Kerajaan di Eropa yang feodalistik.

Setiap kerajaan Simalungun, dalam melaksanakan tugas pemerintah umum, maka seorang Raja sebagai pimpinan kerajaan dibantu oleh sebuah Dewan yang dinamakan *Harajaan* yaitu semacam kabinet yang terdiri dari para pembesar Negeri atau orang-orang besar Kerajaan dan kepada mereka diberikan Gelar yang bervariasi menurut masing-masing Kerajaan yang bersangkutan, (Juanda dan erond,2011:46)

### **Tujuan**

Adapun yang diharapkan dari tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh masuknya Belanda terhadap struktur pemerintahan dan kehidupan politik kerajaan purba.
2. Mengetahui bagaimana sebenarnya hubungan dan interaksi Belanda dengan Kerajaan Purba.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah metode historis (sejarah).

Menurut Louis Gottschalk bahwa metode Sejarah memiliki 4 (empat) tahapan,yaitu: (1)Heuristik, (2)Kritik (3)Interpretasi(4)Historiografi.

Fase **Heuristik** adalah mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan topik yang di bahas. Pada tahap ini, Kegiatan diarahkan pada penjajakan, pencarian dan pengumpulan sumber-sumber baik berupa benda maupun sumber tulisan. Dokumen adalah sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan tertulis dan petilasan-petilasan arkeologi (Gottschalk, 2006:45-46). Pengumpulan data dengan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dengan melihat secara langsung di Kerajaan Purba dengan adanya rumah bolon juga dilakukan sembari memeriksa buku-buku di Perpustakaan Universitas USI dan ruang baca sejarah FKIP USI.

Fase **Kritik** adalah penyeleksian terhadap sumber atau data yang yang di peroleh. Data-data yang diperoleh penulis dari sejumlah literatur hasil pengamatan lapangan, diolah sedemikian rupa, kemudian

diseleksi dan dipilah untuk dijadikan sebagai sumber penulisan.

Fase **Interpretasi** adalah penafsiran terhadap fakta yang di peroleh dari sumber buku-buku yang relevan dengan penulisan.

Fase **Historiografi** adalah tahap akhir dari seluruh rangkaian metode Sejarah. Keseluruhan tahapan lantas dielaborasi sehingga menghasilkan sebuah bentuk historiografi.

## **PEMBAHASAN**

### **Kerajaan Purba Sebelum**

#### **Masuknya Belanda**

#### ***Letak Geografis kerajaan Purba***

Letak Pematang Purba adalah sebelah timur Haranggaol dan sebelah utara Pematang Raya. Di kata bahwa daerah kerajaan purba cocok juga sebagai daerah pertanian. Faktor utama yang mendukung letak dan keadaan geografis yang strategis tersebut keadaan tanahnya yang subur. Dengan keadaan tanah subur yang tergolong cukup telah memberi kesempatan bagi penduduk untuk mengolah sistem pertanian dengan baik.

Pada masa sebelum masuknya Belanda Pematang Purba merupakan penghasil sayuran dan buah-buahan yang terbaik. Hasil bumi yang utama dari Pematang Purba pada saat itu yaitu Jagung dan Padi. Bila dilihat dari penggunaan lahan (tanah) di wilayah Pematang Purba sebagian besar digunakan untuk lahan perkebunan padi darat dan jagung.

#### ***Penduduk Kerajaan Purba***

Pada masa itu penduduk di sekitar Kerajaan purba, apa bila sudah tiba masanya panen, penduduk harus memberikan hasil panennya dan hasil penjualan dari ternak yang dipelihara Kepada Raja. Sebelum masa penanaman dan pengambilan hasil panen, penduduk terlebih dahulu menanyakan kepada Guru Bolon atau datu untuk mengetahui hari baik untuk mendapatkan hasil panen yang banyak, ( M.D.Purba1977 : 6 ).

#### ***Adat Istiadat Kerajaan Purba***

Dalam kekerabatan dikenal dengan adanya Lembaga Adat yang

disebut “*Tolu Sahundulan Lima Saodoran*” yaitu :

1. (Tondong ; tuhan yang nampak),
2. (Sanina / Sapanganonkon ; Sanak Saudara)
3. (Anak Boru (Pihak Ipar)
4. Tondong ni Tondong (Tuhan yang ada pada Tondong)
5. Boru ni Boru / Anak Boru Mintori (Ipar dari Ipar)

Tolu Sahundulan dan Lim saodoran adalah gambaran posisi masing-masing orang dalam upacara adat dalam sistim kekerabatan. Tolu Sahundulan (Tiga dalam satu tempat duduk) yaitu menjelaskan bagaimana posisi masing-masing dalam suatu ruangan untuk duduk, dimana tempat duduk dibagi menjadi 3 (tiga) tempat yaitu Sanina/Sapangan konon mengambil tempat duduk ditengah-tengah, Tondong tempat duduknya dibagian kanan dari Sanina (Suhut) dan Anak Boru tempat duduknya disebelah kiri Suhut, jadi ketiga hubungan kekerabatan ini berada dalam satu tempat duduk (Tolu Sahundulan). (Purba, 1996 : 14- 16).

### ***Struktur Pemerintahan dan Politik Kerajaan Purba***

Struktur pemerintahan Kerajaan Purba berbentuk suatu Dewan yang disebut Harajaan, (1)Raja (2)Tungkat (3) Parbapaon (4).partuanon (5).Pangulu karena disamping Raja masih ada perangkat-perangkat kerajaan yang disebut Tungkat (Orang Kaya), Gamot, dan Pangulu Dusun. Dalam bidang kemiliteran, Raja berfungsi sebagai panglima Tertinggi dan sebagai Pimpinan Militer diangkat Raja Goraha (Panglima Perang). Untuk mengelola harta kekayaan dan perbendaharaan kerajaan ditunjuk salah seorang Tungkat (Orang Kaya).

*Panguluu dusun* adalah *Partuanon* (kaum bangsawan) yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan Raja melakukan tugas pemerintahan, pembangunan dan urusan kemasyarakatan diwilayahnya masing-masing, sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh pimpinan kerajaan. Raja berfungsi sebagai hakim tertinggi dalam badan peradilan tinggi di Kerajaan itu yang disebut dengan nama Harapatan *Na Bolon*, identik dengan kedudukan

Raja dalam masalah peradilan ini, maka partuanon (Pangulu-Dusun) juga berfungsi sebagai Hakim Daerah (Peradilan Tingkat Pertama) yang disebut *Harapatan Urung*. *Harapatan* (Badan Peradilan) tersebut selain menyelesaikan persoalan (perkara-perkara) pidana dan perdata adat, juga memutuskan pelanggaran-pelanggaran adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan, Raja memimpin pejabat bawahan bersama Harajaan bermusyawarah merumuskan sistim pemerintahan dan adat istiadat. Hasil musyawarah menjadi adat (peraturan) jadi pedoman hidup dan kehidupan dalam pemerintahan maupun kekeluargaan, karena hasil musyawarah adalah pendapat bersama yang baik dan benar, lalu dijadikan adat (peraturan), maka pelaksanaannya berlandaskan “*Habonaron Do Bona*”,(Tambak,1982 :10-11).

### ***Struktur Kepercayaan Kerajaan Purba***

Ajaran Hindu dan Budha juga pernah memengaruhi kehidupan di Simalungun, hal ini terbukti dengan peninggalan berbagai patung dan

arca yang ditemukan di beberapa tempat di Simalungun yang menggambarkan makna Trimurti (Hindu) dan Sang Buddha yang menunggangi Gajah (Budha). (Purba, Tambak,1982:12-13).

### **Kerajaan Purba Sesudah**

#### **Masuknya Belanda**

#### ***Masuknya Belanda Di Kerajaan Purba***

Setelah keberhasilan Nienhuijs memperluas usaha perkebunan tembakaunya di Deli, maka pemerintah Kolonial menyusun rencana untuk meluaskan pengaruhnya di Sumatera Timur. Ironisnya, meskipun daya tariknya bermotif ekonomi, potensi mendorong rencana ekspansinya justru muncul dibidang politik. Proses pelaksanaan rencana ini dipercepat oleh 2 (dua) faktor: traktat Sumatera 20 November 1871 antar-Belanda dan Inggris dan perang Aceh 1873-1907. Dengan adanya teraktat Sumatera ini maka Belanda memiliki kekuasaan untuk meluaskan ekspansinya keseluruhan Sumatera termasuk Aceh. Sebaliknya Belanda memberikan jaminan

keselamatan berlayar dan kebebasan berdagang kepada Inggris. Dari sinilah asal-muasal kehidupan politik di Simalungun, yang dibawa oleh Belanda (Juanda dan erond,2011: 55).

Secara resmi nama Simalungun di pergunakan dalam pemerintahan Hindia Belanda, dimuat dalam Surat Keputusan Gubernurnment (Pemerintah Hindia belanda) tanggal 12 desember 1906 No. 22 , Yaitu pada pembentukan ”Afdeling Simalungun en de Karo landen” dengan Sisten Residen yang pertama C. J. Westen-Berg, bekas Controleur Tanah Karo, (Purba,:1995:1-6).

Pembagian wilayah pemerintahan didasarkan pada wilayah-wilayah kerajaan yang berdiri di Simalungun. Perpecahan ini tidak dapat dilepaskan dari politik *divide at impera*-nya kolonial Belanda. Masa perpecahan ini terjadi mulai tahun 1865 sampai dengan tahun 1907. Dengan masuknya aliran dana kapitalis dari eropa, usaha ini juga dilakukan dengan membuka perkebunana secara besar-besaran.

Masuknya Belanda secara bertahap ke Simalungun telah membawa perubahan sistem pemerintahan yang menjadi sistem pemerintahan kolonial. Perubahan ini berdampak dibatasinya peran *harajaon* (kerajaan) yang berkuasa. Melalui Besluit Gubernurnment Nomor 22 (Staatsblad Nomor 531) tanggal 12 Desember 1906 dibentuklah afdeling Simalungun en de Karo landen yang dikepalai oleh asisten residen V.C.J. Westenberg di Seribu Dolok. Wilayah administrasi pemerintahan dibagi ke dalam 7 *landschapskassen* (penguasa setempat) yang terdiri dari 16 distrik dan huta (kampung) yang dibuat berdasarkan kekuasaan raja-raja yang masih berkuasa di Simalungun pada masa itu.

Raja-raja yang berkuasa memberi persetujuan kepada Belanda untuk menganeksasi wilayahnya untuk dijadikan perkebunan-perkebunan besar seperti perkebunan sawit, karet dan lain-lain yang sampai sekarang masih berdiri. Saat pembukaan perkebunan tersebut hampir tidak ada perlawanan karena pada masa itu tanah tidak dimiliki

oleh rakyat, tapi dimiliki dan dikuasai oleh partuanon (penguasa lokal setingkat desa) yang tunduk kepada raja di wilayahnya. Keberadaan perkebunan tersebut membawa dampak pada tatanan sosial yang terjadi di Simalungun. Seperti imigrasi penduduk ke wilayah Simalungun, baik yang memang ingin mengadu nasib maupun yang didatangkan Belanda sebagai buruh perkebunan.

Dengan demikian Pemerintahan Raja-raja mengalami perubahan sudah mulai terasa sejak tahun 1889 dimana pengaruh belanda melalui Controleur Batubara mulai merembes ke Kerajaan Tanoh Jawa, Siantar, Panei. Selanjutnya begitu pula melalui pengaruh Controleur Belanda V.C.J Westenberg yang berkedudukan di Bangun Purba sejak tahun 1904 mulai mempengaruhi Kerajaan Dolog Silo, Silimakuta, Purba,dan Raya. Mula-mula Asisten Residen ini berkedudukan di Saribu Dolok akan tetapi untuk memperlancar pelaksanaan dari pada surat keputusan pemerintah Hindia Belanda maka dibuat sementara Westenberg pada tahun 1905-1907

dia tetap tinggal di Perdagangan Tomuan dan pada tahun 1907 kedudukan Controleur Dari saribu Dolok di pindah ke Siantar. Berkat pengaruh yang kuat dari Westenberg di Simalungun (istrinya orang Simalungun Boru Purba Tambak), maka Raja-raja di Simalungun bersedia menanda tangani Korte Verklaring (Perjanjian pendek), pelaksanaanya adalah sebagai berikut:

1. kerajaan panei,raya dan Silimakuta tanggal 4 September 1907
2. Kerajaan Purba, tanggal 5 September 1907
3. Kerajaan Tanoh Jawa, tanggal 6 September 1907
4. Kerajaan Dolog Silou, tanggal 10 September 1907
5. Kerajaan Siantar,tanggal 16 September 1907

Onder Afdeling Simalungun dibagi habis dalam 7 Kerajaan, dan Kerajaan dibagi atas beberapa Distrik,dan selanjutnya Distrik dibagi menjadi beberapa kampung (huta).

Pada masa penjajahan Belanda pelaksanaan pembangunan di Simalungun berjalan dengan pesat,

namun hasilnya sebagian besar untuk pemerintah Belanda dan sebagian kecil untuk para Raja-Raja. Pembukaan *Onderneming* (Perkebunan besar) yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan asing baik pemerintah Hindia Belanda maupun Swasta yang dilindungi oleh pemerintah Hindia Belanda.

Perkembangan yang pesat dalam pembangunan perkebunan ini, karena pada saat itu Belanda sudah mulai memasuki era imperialisme modern dengan memberlakukan Undang-Undang Agraria tahun 1870 bagi seluruh wilayah Hindia Belanda yang menciptakan iklim kemantapan berusaha bagi para pengusaha Belanda atau orang Eropa lainnya.

Dalam sistem Swapraja ini raja-raja *Voorzitter* (Hakim) dikukuhkan akan tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka telah menjadi alat kolonial. Sebagai bukti Raja-raja sudah ditugaskan memungut pajak dan bagi rakyat yang tidak mampu membayar pajak dipaksa untuk melaksanakan kerja Rodi (kerja paksa).

Selanjutnya Belanda menjalankan politik adu-dombanya diantara Raja dengan para bawahan raja, sehingga ada perselisihan antara Raja dan Bawahannya. Dengan begitu Belanda lebih mudah dan leluasa untuk menguasai Kerajaan Purba, dan wilayah-wilayah kekuasaan Kerajaan Purba, (Purba, 1995: 35-59).

### ***Pengaruh Terhadap Penduduk***

Belanda mendekati Para kepala adat dengan berbagai macam cara dilakukan untuk membujuk dan menghasut agar mau mengikuti perintah Belanda. Karena kuatnya rasa percaya diri para kerua adat kokohlah mereka, namun ada juga ketua Adat yang tunduk kepada Belanda dikarenakan Belanda menjanjikan akan mengangkatnya menjadi raja dan diberi uang dan kekuasaan oleh Belanda. Pada umumnya adat istiadat di Kerajaan Purba masih sama seperti sebelum masuknya Belanda di Kerajaan Purba, Kepala Adat masih dipakai, hanya saja sedikit ada perubahan yang dibuat oleh Belanda yaitu mengangkat mana yg tunduk dan dia

suka akan diangkat jadi kepala adat  
waupun tidak sesuai dan melalui  
upacara adat

### ***Pengaruh Terhadap Kepercayaan***

Kepercayaan Kerajaan Purba  
pada umumnya masih menganut  
Animisme yang sudah dipengaruhi  
ajaran Hindhu. Namum yang paling  
terasa saat ini adalah Didaerah  
Kerajaan Purba pemerintah Belanda  
memaksakan agama yang dianutnya.  
Belanda memaksa Raja Purba,  
keluarganya beserta Penduduknya  
untuk memeluk Agama Kristen  
Agama yang di anut oleh Belanda,  
(Purba, M.d.1977 : 8-10).

### ***Pengaruh Terhadap Pemerintahan dan Politik***

Pemerintahan Kerajaan Purba  
awalnya dipegang oleh para Raja-  
raja lokal beserta dewan yang  
berkuasa diseluruh wilayah rakyat.  
Sistem pemerintahan yang berlaku  
adalah turun temurun dan menjadi  
raja adalah putra yang dilahirkan  
oleh *puang bolon* (Permaisuri). Jika  
puang bolon tidak melahirkan putra  
mahkota, maka putra dari puang

bona Dapat dinobatkan menjadi raja  
(Purba,M.D,1980: 10).

*Puang bona* adalah istri  
utama dari raja yang dipilih yang  
dinilainya sendiri dari sekian banyak  
istri-istrinya. Namun jika puang bona  
juga tidak melahirkan putra,maka  
tahta kerajaan dapat diserahkan  
kepada partuanon untuk berunding  
memilih diantara mereka dinobatkan.  
Pemerintahan terkecil dan terendah  
pada kerajaan Purba adalah desa atau  
huta. Suatu ciri khas dari *huta* di  
Kerajaan Purba adalah bahwa ikatan  
sosial dibarengi dengan ikatan  
kekerabatan berdasarkan adat (bukan  
kekerabatan garis keturunan semata-  
mata). Pada masa itu dibawah raja  
pemerintahannya dipegang oleh  
*Pangulu huta*, pengangkatannya pada  
awalnya adalah harus berdasarkan  
pengakuan dari penguasa yang lebih  
tinggi yaitu pihak *partongah*  
(penguasa) Kerajaan. Hal ini  
dilakukan oleh raja dalam rangka  
mencegah kemungkinan terjadinya  
*manundalhon arihan* (membelot),  
yakni karena suatu hal menundukkan  
diri dan minta pengakuan diri dari  
raja. Dengan sendirinya huta tersebut

berasal dari suatu penguasa kepenguasa penguasa lain.

Bukan mustahil pula penguasa huta meningkat menjadi penguasa beberapa huta untuk kemudian terbentuk partuanon atau parbapaon (tingkat yang lebih tinggi yang membawahi beberapa huta) yang memisahkan diri dari partuanon atau parbapaon semula. Seperti halnya Kerajaan Purba yang dikepalai oleh seorang Raja langsung memerintah rakyatnya. Pada zaman Belanda Kedudukan raja semakin diperhatikan oleh pemerintah Hindia Belanda mengingat posisi mereka yang dekat dengan rakyatnya. Melihat kekuasaan belanda yang demikian kuat kuat dan drastis menjatuhkan Raja Purba yang tidak disukainya, lalu mengangkat yang diinginkannya walaupun tidak sesuai dengan hukum adat membuat penduduk menjadi takut terlibat. Yang tidak tahan melihat keadaan ini, jadi apatis dan menjauhkan diri dan pindah kepedalaman, lalu timbullah rasa rendah hati. Hal ini dimanfaatkan oleh Belanda dengan tujuan untuk mendapatkan tenaga kerja untuk bekerja pada

perkebunan-perkebunan Belanda dikawasan Simalungun.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Setelah dilakukan penulisan penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Pendekatan yang dilakukan pemerintah belanda sangat luas karena mampu mengganti pemimpin yang dipilih pihak adat suku simalungun.
2. Terjadi pergeseran dari wilayah kekuasaan *harajaan (dewan raja)* menjadi admintrasif gaya kolonial.
3. Tidak banyak perlawanan terhadap pengaruh belanda karena *divide et impera* sangat kuat diterapkan belanda, dan meskipun tetap dipertahan kekuasaan raja pada kenyataannya itu hanya kekuasaan belaka.
- 4.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adat Istiadat Simalungun.1997 Pematang Siantar : Bina Budaya Simalungun
- Batara, Sangti,1977. *Sejarah Batak*, Balige : Karl Sianipar & Co.,

Djahutar Damanik, 1974. *Jalannya Hukum Adat Simalungun*,(tanpa penerbit).

Purba,D. K .1987. *Sejarah Asal – Usul Terjadinya dan Makna Nama Simalungun*, Pematang Siantar : Partuha Maujana Simalungun.

Purba,M .D. 1977. *Mengenal Kepribadian Asli Rakyat Simalungun*, Medan : Penerbit MD. Purba jl. Pattimura.

Purba,Radjamin, 1966. *Pembangunan dan perubahan Struktur Desa di Kabupaten Simalungun*, Pematang Siantar : Pemda Kabupaten Simalungun.

Purba Tambak,T. B. A, 1982. *Sejarah Daerah Simalungun*, Pematang Siantar : Yayasan Museum Simalungun,

Gottschalk,Louis,1975,*Mengerti Sejarah*,UI Press.Jakarta

Juandaha Raya Dasuha dan Erond L Damanik, 2011, *Kerajaan Siantar Dari Pulau Holong ke Kota Pematangsiantar*, Ihutan Bolon Hasadaon Damanik Boru Pakon Panogolan Siantar Simalungun, Pematangsiantar